

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2016**



**DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN**

**FEBRUARI
2017**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016 ini, berpedoman kepada :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Nomor : 060.4/329/Org, tanggal 23 Desember 2016.

Harapannya penyusunan laporan ini menggambarkan dengan jelas hasil pelaksanaan program dan kegiatan Disnakersos Kota Balikpapan, baik kendala maupun keberhasilannya, sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan di masa mendatang, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan sosial.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, diucapkan terima kasih.

Balikpapan, Februari 2017

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi	2
1.4. Isu-isu Strategis	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	6
2.3. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan.

RPJMD Kota Balikpapan periode 2011-2016 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih pada periode tersebut, selanjutnya dijadikan acuan dalam perencanaan pencapaian target kinerja SKPD yang dituangkan dalam Renstra.

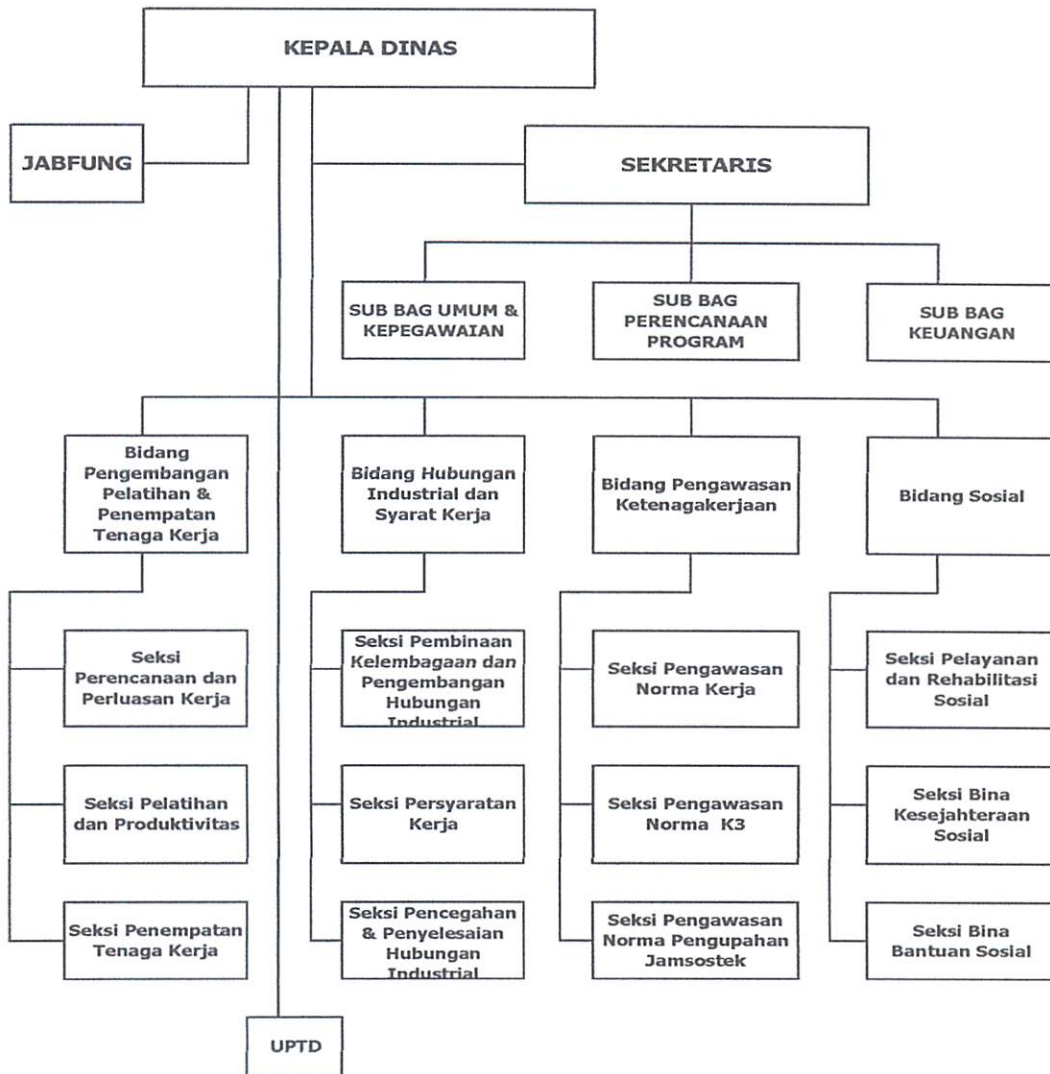
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Tahun 2016.

Laporan ini disusun sesuai format pelaporan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi menurut Wright dkk (1996:188) merupakan bentuk cara di mana tugas dan tanggungjawab dialokasikan kepada individu, di mana individu tersebut dikelompokkan ke dalam kantor, departemen, dan divisi. Struktur tersebut seyogyanya senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan publik dan lingkungan dalam rangka terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan proses kerja yang cepat.”

Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2009, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan diatur sebagai berikut :



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan sebagai penyelenggara urusan bidang ketenagakerjaan dan bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Aspek-aspek strategis ketenagakerjaan meliputi : jumlah angkatan kerja, jumlah penempatan tenaga kerja, kualitas dan produktifitas tenaga kerja, jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jumlah pelanggaran peraturan ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja, jumlah tenaga kerja/ buruh yang telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Aspek strategis sosial meliputi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jumlah PMKS yang telah mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial, jumlah PMKS yang menerima bantuan program pemberdayaan kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Adapun aspek strategis bidang ketenagakerjaan dan sosial yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disnakersos Kota Balikpapan periode 2011-2016 :

	BIDANG	ASPEK STRATEGIS
a.	Pengembangan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja; 3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja.
b.	Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang selaras dan harmonis.
c.	Pengawasan Ketenagakerjaan	- Pembinaan dan pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
d.	Sosial	Peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan tantangan bagi organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai langkah penyelesaiannya. Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) bidang ketenagakerjaan maupun sosial yang dihadapi organisasi :

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
2. Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan;
3. Penurunan perselisihan hubungan industrial;
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja di Kota Balikpapan, baik yang berbasis kompetensi, berbasis

masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kesempatan dan perluasan kerja.

Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan melalui pembinaan dan pengawasan perusahaan, baik dari segi norma kerja, norma K3, dan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi : pemeriksaan perusahaan, wajib lapor ketenagakerjaan, maupun pemeriksaan peralatan di perusahaan.

Penurunan perselisihan hubungan industrial melalui peningkatan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik dalam bentuk penyuluhan, bimtek, sosialisasi, monitoring, dan pelayanan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui verifikasi dan validasi pendataan sasaran PMKS, pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, maupun pemberian bantuan tepat sasaran;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Disnakersos Kota Balikpapan adalah “ Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Kondusif dan Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”, dan dijabarkan dalam misi berikut :

- a. Pembinaan Ketenagakerjaan
- b. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Disnakersos dijelaskan pada tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1. Tujuan ,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Disnakersos Kota Balikpapan Tahun 2016

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	$\frac{\sum \text{Pencaker yang mendapatkan pelatihan}}{\sum \text{Pencaker yang menjadi target pelatihan}}$	70%
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan di perusahaan	$\frac{\sum \text{Pencaker terdaftar yang ditempatkan}}{\sum \text{lowongan kerja terdaftar}}$	25%
2	Meningkatnya pelaksanaan peraturan	Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan	pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	$\frac{\sum \text{pekerja perusahaan yg menjadi peserta BPJS}}{\sum \text{pekerja yang tercatat wajib lapor}}$	100%
			Persentase pemeriksaan perusahaan	$\frac{\sum \text{perusahaan yang telah diperiksa}}{\sum \text{perusahaan yang tercatat wajib lapor}}$	25%
3	Menurunnya perselisihan hubungan industrial	Peningkatan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\sum \text{Penyelesaian Perselisihan HI dengan PB}}{\sum \text{kasus yang dicatatkan}}$	50%
4	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan PMKS	Peningkatan pelayanan dan perlindungan PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	$\frac{\sum \text{PMKS yang mendapat bantuan}}{\sum \text{PMKS yang seharusnya mendapat bantuan}}$	20%

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan Disnakersos Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016, dijelaskan pada tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2. RKT Disnakersos Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	3	4
	I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,468,103,000
01.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,050,000
02.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115,200,000
03.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20,000,000
04.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor	157,388,000
05.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.011. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185,975,000
06.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,034,000
07.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29,340,000
08.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman	238,780,000
09.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.018. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	375,000,000
10.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.019. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	336,336,000
	II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,184,650,000
11.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	301,650,000
12.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	151,000,000
13.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	485,500,000
14.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
15.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	201,500,000
16.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	45,000,000

1	3	4
	III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	30,500,000
	17. Kode Rekening 1.14.1.14.01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30,500,000
	IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	175,000,000
	18. Kode Rekening 1.14.1.14.01.05.060. Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan dan Sosial	175,000,000
	V. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	425,648,000
	19. Kode Rekening 1.14.1.14.01.08.015. Pengelolaan informasi ketenagakerjaan dan sosial	292,803,000
	20. Kode Rekening 1.14.1.14.01.08.019. Pembuatan Aplikasi Perijinan IMTA	132,845,000
	VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3,125,575,000
	21. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.016. Pelatihan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Terdidik	363,200,000
	22. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.018. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	1,998,630,000
	23. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.020. Pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan	113,415,000
	24. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.022. Rapat Kordinasi Perencanaan Tenaga Kerja	150,330,000
	25. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.023. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Di Kota Balikpapan	500,000,000
	VII. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	936,605,500
	26. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.002. Job market fair (jmf) / pameran bursa kerja	300,540,000
	27. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.005. Pembinaan lembaga pelatihan kerja (lpk)	21,000,000
	28. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.013. Bimbingan Teknis Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja	78,570,000
	29. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.018. Apprentice market fair/ bursa pemagangan	125,800,000
	30. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.019. Sosialisasi pemagangan dalam negeri	32,902,500
	31. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.020. Penyuluhan bimbingan jabatan dan bursa kerja khusus	106,934,500
	32. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.021. Pelayanan antar kerja	270,858,500

1	3	4
	VIII. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	2,204,976,040
	33. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.012. Kampanye bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	136,757,500
	34. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.021. Penyuluhan Penegakan Hukum Norma Pengupahan	71,781,000
	35. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.027. Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan Bidang Pengupahan	21,350,000
	36. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.033. Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Kerawanan Ketenagakerjaan	92,900,000
	37. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.034. Penyelesaian perkara penyelesaian hubungan industrial (mediasi)	146,151,500
	38. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.036. Pengendalian dan koordinasi dewan pengupahan dalam penetapan umk	222,625,000
	39. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.037. Pembinaan syarat kerja dan outsourcing	110,610,000
	40. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.038. Pengendalian dan kordinasi lembaga kerjasama tripartit (lks) tripartit	261,798,000
	41. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.039. Pemasyarakatan hubungan industrial	223,751,000
	42. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.042. Pembinaan dan pengawasan norma kerja	176,492,500
	43. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.043. Pembinaan dan Penilaian Norma K3 di Perusahaan	264,789,540
	44. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.044. Pembinaan, pencegahan dan penyelesaian Hubungan Industrial	201,240,000
	45. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.045. Sosialisasi norma pengupahan	75,305,000
	46. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.047. Pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	199,425,000
	IX. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	454,368,750
	47. Kode Rekening 1.14.1.14.01.18.001. Pelatihan tenaga kerja bagi gakin	454,368,750

1	3	4
	X. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20,000,000
	48. Kode Rekening 1.06.1.14.01.21.030. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	20,000,000
	XI. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	3,386,815,846
	49. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.001. Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	268,000,000
	50. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.004. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Disabilitas	322,380,000
	51. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.013 Pelayanan Sosial dan Pengasuhan Anak	1,062,691,846
	52. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.014. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terpadu	691,374,000
	53. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.020. Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)	107,390,000
	54. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.021. Askesos Lansia Terlantar	364,685,000
	55. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.022. Rumah Perlindungan dan Trauma Center	220,467,000
	56. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.023. Pengelolaan Rumah Rehabilitasi Sosial Anak	349,828,000
	XII. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO	480,405,850
	57. Kode Rekening 1.13.1.14.01.19.009. Pembinaan dan peningkatan sarana lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	480,405,850
	XIII. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	432,436,750
	58. Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.002. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	187,275,000
	59. Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.007. Pendampingan dana dekonsentrasi askessos bagi pekerja sektor non formal	72,525,000
	60. Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.009. Pelatihan pemantapan pekerja sosial masyarakat (PSM)	117,531,750
	61. Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.010. Pembinaan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Balikpapan	55,105,000

1	3	4
	XIV. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 62. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.001. Pembinaan kelompok usaha bersama (kube) 63. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.007. Pembinaan taruna siaga bencana (tagana) 64. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.008. Penyuluhan sosial tentang pmks dan psks 65. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.009. Bimbingan teknis kader inti karang taruna (tikar) kota Balikpapan 66. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.010. Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (pkh) 67. Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.011. Fasilitasi Bhakti Sosial TAGANA Tingkat Nasional Tahun 2016 XV. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 68. Kode Rekening 1.19.1.14.01.17.007. Pelaksanaan peringatan hari pahlawan XVI. PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANSOS 69. Kode Rekening 1.19.1.14.01.26.003. Verifikasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial	2,214,695,450 240,880,200 466,400,000 124,922,500 113,309,750 269,183,000 1,000,000,000 370,465,000 370,465,000 25,000,000 25,000,000
	J U M L A H	16,935,245,186

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Disnakersos Kota Balikpapan dijelaskan sebagaimana berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1.	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	70%
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan di perusahaan	25%
2.	Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	100%
		Persentase pemeriksaan perusahaan	25%
3.	Peningkatan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%
4.	Peningkatan pelayanan dan perlindungan PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	20%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,090,093,400	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 336,750,000	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 30,500,000	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp -	
5. Program Pengembangan Data / Informasi	Rp 117,291,500	
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1,035,217,500	
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 371,390,500	
8. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 1,100,993,450	
9. Program Penanggulangan Kemiskinan	Rp 415,260,000	
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 16,259,000	
11. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 1,215,480,800	
12. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Rp 137,185,850	
13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 271,290,750	
14. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Rp 1,335,617,550	
15. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 102,827,400	
16. Program Pengelolaan Hibah dan Bansos	Rp 1,275,000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai surat Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan Nomor : 700/070/TIM-VI, tanggal 13 Juli 2016, perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Disnakersos Kota Balikpapan 2015, maka Disnakersos memperoleh nilai 50,32 atau cukup (kategori : CC). Sebagai upaya perbaikan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disnakersos, maka Inspektorat Kota Balikpapan merekomendasikan beberapa hal berikut :

- a. Reviu Renstra, sehingga memuat indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran terukur serta berorientasi hasil;
- b. Menyempurnakan Indikator Kinerja Utama sesuai Permen PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2012 tahun 2012;
- c. Menyusun Rencana Aksi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja ;
- d. Menyusun Indikator Kinerja Tingkat eselon III dan eselon IV.

Berdasar hal di atas, maka telah dilakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Kota Balikpapan.

Adapun capaian kinerja Disnakersos pada tahun anggaran 2016 dijelaskan dalam tabel 3.1.1. di bawah ini :

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Disnakersos Kota Balikpapan Tahun 2016

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi	
					2015	2016	2015	2016
1	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	%	70	70	65.76	51.47
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan di perusahaan	%	25	25	22.05	30.75
2	Meningkatnya pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	%	100	100	100	100
			Persentase pemeriksaan perusahaan	%	25	25	23.85	20.42
3	Menurunnya perselisihan hubungan industrial	Peningkatan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	50	50	38.02	48.18
4	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan PMKS	Peningkatan pelayanan dan perlindungan PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	20	20	16.79	8.91

Analisis capaian kinerja Disnakersos dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan indikator persentase pencari kerja (pencaker) yang mendapatkan pelatihan belum mencapai target, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase pencaker yang mendapatkan pelatihan juga menurun. Hal tersebut disebabkan menurunnya kemampuan keuangan daerah akibat defisit anggaran dan belum tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) lokal yang menyelenggarakan pelatihan dimaksud, sehingga ada pelatihan yang tidak dilaksanakan (pelatihan dan sertifikasi Las, serta perhotelan kapal pesiar);
- b. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan indikator persentase pencaker yang ditempatkan diperusahaan mencapai target yang ditetapkan, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan kinerja 8,7 %;
- c. Persentase pekerja/buruh yang menjadi anggota BPJS telah memenuhi target, dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 tidak ada peningkatan kinerja;
- d. Persentase pemeriksaan perusahaan belum mencapai target, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian pada tahun 2016 terjadi penurunan. Penurunan disebabkan antara lain terbatasnya sumber daya aparatur (Fungsional pengawas ketenagakerjaan semakin berkurang karena ada yang memasuki pension/purna tugas), serta penurunan kemampuan keuangan daerah (defisit anggaran);
- e. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB) belum memenuhi target. Faktor yang mempengaruhi antara lain : itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih, belum optimalnya upaya pembinaan pencegahan perselisihan, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, maupun pembentukan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan. Jika ditinjau dari ketersediaan sumberdaya, maka masih terdapat keterbatasan fungsional mediator hubungan industrial, dan penurunan kemampuan keuangan daerah;
- f. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan belum mencapai target, dan terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya target kinerja maupun penurunan kinerja atas beberapa indikator disebabkan terbatasnya sumberdaya aparatur, khususnya tenaga fungsional (pengantar kerja, mediator, dan pengawas ketenagakerjaan), terlebih dengan kebijakan moratorium PNS maka keterbatasan sumber daya manusia akan sulit untuk diatasi. Selain itu, berkurangnya kemampuan keuangan daerah (defisit anggaran) merupakan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Disnakersos Kota Balikpapan.

Adapun analisis capaian kinerja pelayanan ketenagakerjaan terhadap target nasional, dalam hal ini adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ketenagakerjaan sesuai dengan Permenakertran No. Per.15/Men/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketenagakerjaan dijelaskan pada tabel 3.1.2. di bawah ini :

**Tabel 3.1.2 Capaian SPM Ketenagakerjaan
Disnakersos Kota Balikpapan Tahun 2016**

No.	Indikator Kinerja SPM	Target SPM	Realisasi Capaian Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	68.09%	57.05%	64.76%	53.30%	60.66%
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	100%	92.31%	96.88%	87.67%	70.37%
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	90.91%	62.50%	70.18%	100%	26.67%
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	45%	20.54%	8.21%	45.00%	22.05%	12.12%
5	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	55.56%	55.13%	49.18%	38.02%	48.18%
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	12.72%	11.75%	15.09%	23.85%	9.07%
8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	94.82%	84.94%	100%	100%	16.75%

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar. Berdasar pengertian tersebut, maka pelatihan kerja berbasis kompetensi didefinisikan sebagai pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan layanan pelatihan kerja berbasis kompetensi selama lima tahun terakhir jika dirata-ratakan, maka setiap tahunnya mencapai 60,8 % dari target nasional sebesar 75 %. Capaian kinerja penyelenggaraan pelatihan saat ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah, mengingat penyelenggaraan pelatihan memerlukan biaya yang cukup besar, selain itu perlu pula didukung dengan ketersediaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi. Hasil (outcome) pelatihan adalah meningkatkan

kualitas pencari kerja, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Berdasarkan monitoring penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat selama lima tahun terakhir, capaian kinerja mengalami trend menurun. Capaian kinerja tertinggi pada tahun 2012 (100%) dan terendah pada tahun 2016 (70 %). Hal ini disebabkan jenis pelatihan berbasis masyarakat banyak yang sudah dapat diselenggarakan secara mandiri, dan defisit anggaran pada tahun 2016. Adapun jenis-jenis pelatihan yang dimaksud meliputi : tata boga, kecantikan, menjahit dan mengemudi. Hasil pelatihan berbasis masyarakat dapat meningkatkan skill pencari kerja, sehingga dapat diterima bekerja di bidang yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki atau membuka peluang usaha sendiri dengan bekal keterampilan tersebut, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yang selama ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan softskill atau perubahan mindset. Perubahan mindset entrepreneurship perlu ditumbuhkan dan terus dikembangkan, sehingga pencari kerja tidak hanya berorientasi untuk menjadi karyawan. Capaian kinerja mengalami trend naik dan turun, capaian tertinggi pada tahun 2015 (100%) dan terendah pada tahun 2016 (27%). Penurunan yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya pengurangan anggaran penyelenggaraan pelatihan sebagai akibat defisit anggaran. Hasil pelatihan kewirausahaan adalah meningkatnya keterampilan manajemen (*management skill*) bagi calon wirausaha baru, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Adapun pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja, sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja

oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota.

Pelayanan penempatan pencari kerja terdaftar belum mencapai target, untuk periode 2011-2016 jika dirata-ratakan baru mencapai 24 % dari target nasional sebesar 45 %. Keterbatasan kinerja antara lain disebabkan kurangnya SDM fungsional Pengantar Kerja, terbatasnya jumlah lowongan terdaftar, serta terbatasnya pencari kerja terdaftar yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan perusahaan. Hasil layanan penempatan pencari kerja terdaftar adalah menurunnya angka pengangguran di Kota Balikpapan.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Perjanjian Bersama adalah persetujuan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Besaran Kasus Perselisihan Hubungan Industrial adalah jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB). Adapun target kinerja ditetapkan 50%, dalam pelaksanaannya mengalami trend turun dan naik, kinerja tertinggi pada tahun 2012 (56%) dan terendah pada tahun 2015 (38%), jika dirata-ratakan capaian kinerja mencapai target (50%). Hasil layanan adalah terciptanya kondusifitas ketenagakerjaan. Capaian tersebut perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan dengan pembinaan rutin, baik melalui sosialisasi/penyuluhan/bimtek, pembentukan Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan, Penguatan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Bipartit, Dewan Pengupahan, serta upaya pemasyarakatan hubungan industrial pada dunia usaha.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Adapun pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK adalah jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi peserta JAMSOSTEK. Capaian kinerja untuk layanan tersebut telah memenuhi target (50%). Hasil dari pelayanan adalah terciptanya kondusifitas ketenagakerjaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Besaran pemeriksaan perusahaan adalah persentase jumlah perusahaan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan. Berdasar monitoring pelaporan capaian kinerja layanan, besaran pemeriksaan perusahaan belum mencapai target yang ditetapkan (45%). Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kondusifitas ketenagakerjaan.

Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu obyek pengawasan ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisa dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku. Adapun besaran pengujian peralatan di perusahaan adalah persentase jumlah peralatan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian. Sesuai hasil monitoring capaian kinerja, maka besaran pengujian peralatan selama 5 tahun terakhir jika dirata-ratakan telah memenuhi target yang ditetapkan (50%), meskipun pada tahun 2016 capaian kinerja tidak memenuhi target, yaitu tercapai 17 %. Hal ini disebabkan perusahaan tidak melaporkan peralatan yang sudah tidak layak/rusak ke Disnakersos. Hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sehingga tercipta kondusifitas ketenagakerjaan.

Capaian kinerja pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimum dijelaskan pada tabel 3.1.3. di bawah ini :

**Tabel 3.1.3 Capaian SPM Sosial
Disnakersos Kota Balikpapan Tahun 2016**

Tahun	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun (Orang)	KETERANGAN
2012	10,842	825	7.61
2013	10,912	754	6.91
2014	12,165	825	7.61
2015	15,368	2,580	16.79
2016	19,987	1,781	8.91

Sumber : Seksi PRS, Bina Kesejahteraan Sosial dan BNN Kota Balikpapan, Oktober 2016.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Disnakersos Kota Balikpapan tahun 2016 dijelaskan pada tabel 3.2. di bawah ini :

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2016
Disnakersos Kota Balikpapan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	APBD MURNI	APBD-P	BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp)
		JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)		FISIK (%)	TTB.	KEUANGAN (Rp)	(%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,468,103,000	1,090,093,400						
	01. Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,050,000	3,000,000	0.04	94.17	0.04	2,600,000	86.67	400,000
	02. Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115,200,000	36,339,000	0.48	100.00	0.48	27,124,068	74.64	9,214,932
	03. Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	20,000,000	14,000,000	0.18	100.00	0.18	9,966,500	71.19	4,033,500
	04. Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor	157,388,000	160,888,000	2.12	99.41	2.11	150,699,400	93.67	10,188,600
	05. Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.011. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185,975,000	156,975,000	2.07	66.31	1.37	93,056,500	59.28	63,918,500

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,034,000	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-
07.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29,340,000	11,840,000	0.16	87.15	0.14	8,098,000	68.40	3,742,000
08.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman	238,780,000	172,225,400	2.27	77.28	1.76	133,095,400	77.28	39,130,000
09.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.018. Rapat-rapat Koordinasi,Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	375,000,000	208,240,000	2.75	79.04	2.17	131,296,034	63.05	76,943,966
10.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.01.019. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	336,336,000	326,586,000	4.31	100.00	4.31	326,586,000	100.00	-
	II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,184,650,000	336,750,000						
11.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	301,650,000	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-
12.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	151,000,000	84,150,000	1.11	94.00	1.04	77,276,600	91.83	6,873,400
13.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	485,500,000	140,000,000	1.85	100.00	1.85	139,300,000	99.50	700,000
14.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12,600,000	0.17	100.00	0.17	11,340,000	90.00	1,260,000
15.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	201,500,000	55,000,000	0.73	100.00	0.73	44,630,759	81.15	10,369,241
16.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	45,000,000	45,000,000	0.59	100.00	0.59	32,500,000	72.22	12,500,000

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	30,500,000	30,500,000						
	17. Kode Rekening 1.14.1.14.01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30,500,000	30,500,000	0.40	96.72	0.39	15,000,000	49.18	15,500,000
	IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	175,000,000	-						
	18. Kode Rekening 1.14.1.14.01.05.060. Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan dan Sosial	175,000,000	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-
	V. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	425,648,000	117,291,500						
	19. Kode Rekening 1.14.1.14.01.08.015. Pengelolaan informasi ketenagakerjaan dan sosial	292,803,000	30,291,500	0.40	100.00	0.40	29,688,000	98.01	603,500
	20. Kode Rekening 1.14.1.14.01.08.019. Pembuatan Aplikasi Perijinan IMTA	132,845,000	87,000,000	1.15	100.00	1.15	83,502,100	95.98	3,497,900
	VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3,125,575,000	1,035,217,500						
	21. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.016. Pelatihan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Terdidik	363,200,000	169,617,500	2.24	98.20	2.20	165,571,335	97.61	4,046,165
	22. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.018. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	1,998,630,000	861,000,000	11.36	100.00	11.36	832,800,000	96.72	28,200,000
	23. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.020. Pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan	113,415,000	4,600,000	0.06	100.00	0.06	4,600,000	100.00	-
	24. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.022. Rapat Kordinasi Perencanaan Tenaga Kerja	150,330,000	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-
	25. Kode Rekening 1.14.1.14.01.15.023. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja DI Kota Balikpapan	500,000,000	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VII. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	936,605,500	371,390,500						
	26. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.002. Job market fair (jmf) / pameran bursa kerja	300,540,000	46,285,000	0.61	98.42	0.60	44,854,500	96.91	1,430,500
	27. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.005. Pembinaan lembaga pelatihan kerja (lpk)	21,000,000	600,000	0.01	100.00	0.01	600,000	100.00	-
	28. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.013. Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	78,570,000	63,170,000	0.83	100.00	0.83	55,874,000	88.45	7,296,000
	29. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.018. Apprentice market fair/ bursa pemagangan	125,800,000	65,580,000	0.87	100.00	0.87	64,355,000	98.13	1,225,000
	30. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.019. Sosialisasi pemagangan dalam negeri	32,902,500	24,812,500	0.33	100.00	0.33	21,662,500	87.30	3,150,000
	31. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.020 Penyuluhan bimbingan jabatan dan bursa kerja khusus	106,934,500	100,934,500	1.33	100.00	1.33	98,958,500	98.04	1,976,000
	32. Kode Rekening 1.14.1.14.01.16.021. Pelayanan antar kerja	270,858,500	70,008,500	0.92	89.46	0.83	54,241,500	77.48	15,767,000
	VIII. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	2,204,976,040	1,100,993,450						
	33. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.012. Kampanye bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	136,757,500	124,267,500	1.64	100.00	1.64	105,283,000	84.72	18,984,500
	34. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.021. Penyuluhan Penegakan Hukum Norma Pengupahan	71,781,000	49,404,000	0.65	94.94	0.62	45,046,000	91.18	4,358,000
	35. Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.027. Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan Bidang Pengupahan	21,350,000	18,650,000	0.25	100.00	0.25	18,650,000	100.00	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.033. Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Kerawanan Ketenagakerjaan	92,900,000	26,750,000	0.35	100.00	0.35	26,750,000	100.00	-
37.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.034. Penyelesaian perkara penyelesaian hubungan industrial (mediasi)	146,151,500	46,978,750	0.62	100.00	0.62	46,978,750	100.00	-
38.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.036. Pengendalian dan koordinasi dewan pengupahan dalam penetapan umk	222,625,000	111,698,500	1.47	99.48	1.47	110,020,500	98.50	1,678,000
39.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.037. Pembinaan syarat kerja dan outsourcing	110,610,000	69,494,100	0.92	98.43	0.90	61,259,100	88.15	8,235,000
40.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.038. Pengendalian dan kordinasi lembaga kerjasama tripartit (lks) tripartit	261,798,000	46,150,000	0.61	100.00	0.61	46,150,000	100.00	-
41.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.039. Pemasyarakatan hubungan industrial	223,751,000	133,980,700	1.77	100.00	1.77	129,910,700	96.96	4,070,000
42.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.042. Pembinaan dan pengawasan norma kerja	176,492,500	86,458,000	1.14	95.88	1.09	77,982,480	90.20	8,475,520
43.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.043. Pembinaan dan Penilaian Norma K3 di Perusahaan	264,789,540	117,104,900	1.55	76.47	1.18	86,273,950	73.67	30,830,950
44.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.044. Pembinaan, pencegahan dan penyelesaian Hubungan Industrial	201,240,000	112,845,000	1.49	100.00	1.49	108,575,000	96.22	4,270,000
45.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.045. Sosialisasi norma pengupahan	75,305,000	69,687,000	0.92	100.00	0.92	64,397,000	92.41	5,290,000
46.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.17.047. Pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	199,425,000	87,525,000	1.16	87.36	1.01	76,465,000	87.36	11,060,000
IX.	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	454,368,750	415,260,000						
47.	Kode Rekening 1.14.1.14.01.18.001. Pelatihan tenaga kerja bagi gakin	454,368,750	415,260,000	5.48	100.00	5.48	415,260,000	100.00	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20,000,000	16,259,000						
	48. Kode Rekening 1.06.1.14.01.21.030. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	20,000,000	16,259,000	0.21	100.00	0.21	16,209,000	99.69	50,000
	XI. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	3,386,815,846	1,215,480,800						
	49. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.001. Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	268,000,000	156,900,000	2.07	89.06	1.84	139,099,610	88.65	17,800,390
	50. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.004. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Disabilitas	322,380,000	230,320,000	3.04	96.17	2.92	215,435,582	93.54	14,884,418
	51. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.013 Pelayanan Sosial dan Pengasuhan Anak	1,062,691,846	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-
	52. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.014. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terpadu	691,374,000	451,437,200	5.96	99.68	5.94	449,977,200	99.68	1,460,000
	53. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.020. Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)	107,390,000	65,270,000	0.86	97.64	0.84	62,230,000	95.34	3,040,000
	54. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.021. Askesos Lansia Terlantar	364,685,000	4,273,500	0.06	100.00	0.06	4,045,000	94.65	228,500
	55. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.022. Rumah Perlindungan dan Trauma Center	220,467,000	187,726,300	2.48	94.57	2.34	177,536,453	94.57	10,189,847
	56. Kode Rekening 1.13.1.14.01.16.023. Pengelolaan Rumah Rehabilitasi Sosial Anak	349,828,000	119,553,800	1.58	99.16	1.56	118,553,800	99.16	1,000,000
	XII. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO	480,405,850	137,185,850						
	57. Kode Rekening 1.13.1.14.01.19.009. Pembinaan dan peningkatan sarana lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	480,405,850	137,185,850	1.81	99.53	1.80	122,647,600	89.40	14,538,250
	XIII. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	432,436,750	271,290,750						
	58. Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.002. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	187,275,000	159,004,000	2.10	100.00	2.10	153,305,363	96.42	5,698,637

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.007. Pendampingan dana dekonstruksi akses bagi pekerja sektor non formal	72,525,000	36,000,000	0.48	100.00	0.48	36,000,000	100.00	-
60.	Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.009. Pelatihan pemantapan pekerja sosial masyarakat (PSM)	117,531,750	67,481,750	0.89	100.00	0.89	64,284,250	95.26	3,197,500
61.	Kode Rekening 1.13.1.14.01.21.010. Pembinaan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Balikpapan	55,105,000	8,805,000	0.12	95.55	0.11	7,738,000	87.88	1,067,000
XIV. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN		2,214,695,450	1,335,617,550						
62.	Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.001. Pembinaan kelompok usaha bersama (kub)	240,880,200	174,120,200	2.30	98.19	2.26	145,184,600	83.38	28,935,600
63.	Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.007. Pembinaan taruna siaga bencana (tagana)	466,400,000	227,080,750	3.00	96.28	2.89	217,832,250	95.93	9,248,500
64.	Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.008. Penyuluhan sosial tentang pmks dan psks	124,922,500	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-
65.	Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.009. Bimbingan teknis kader inti karang taruna (tikar) kota Balikpapan	113,309,750	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-
66.	Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.010. Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (pkh)	269,183,000	141,913,000	1.87	99.04	1.85	138,782,000	97.79	3,131,000
67.	Kode Rekening 1.13.1.14.01.22.011. Fasilitasi Bhakti Sosial TAGANA Tingkat Nasional Tahun 2016	1,000,000,000	792,503,600	10.46	99.98	10.46	792,351,480	99.98	152,120
XV. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		370,465,000	102,827,400						
68.	Kode Rekening 1.19.1.14.01.17.007. Pelaksanaan peringatan hari pahlawan	370,465,000	102,827,400	1.36	91.27	1.24	76,134,750	74.04	26,692,650
XVI. PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANSOS		25,000,000	1,275,000						
69.	Kode Rekening 1.19.1.14.01.26.003. Verifikasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial	25,000,000	1,275,000	0.02	91.37	0.02	670,000	52.55	605,000
J U M L A H		16,935,245,186	7,577,432,700	100.00	96.40	96.50	7,016,295,114	92.59	561,137,586

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.

Dimasa mendatang akan diupayakan kerja keras dan semangat yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan dan dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan serta masyarakat untuk meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya LAKIP Tahun 2016 ini, diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka Peningkatan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menuju terciptanya asas pemerintahan yang baik (*Good Government*), akuntabel serta transparan.

Balikpapan, Februari 2017



LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL**

Jalan Jenderal Sudirman RT. 10 NO. 02 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota
BALIKPAPAN

<http://dlnakersos.balikipapan.go.id>

Kode Pos : 76112

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.46 / 036 / DISNAKERSOS
TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2016 perlu membentuk tim;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4377);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016, dengan susunan personel sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2016;
 2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2016.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 4 Januari 2016

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA BALIKPAPAN**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR : 188.46/036 /DISNAKERSOS
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
 KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) DINAS
 TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN 2016

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)
 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN 2016

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	TIRTA DEWI, S.Sos, M.AP NIP. 19671123 198803 2 005	Ketua
2	ASFIANSYAH, SE NIP. 19611105 198611 1 002	Sekretaris
3	BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Si NIP. 19650123 199403 1 005	Anggota
4	Dra. ASNI BUDIARSIH NIP. 19581018 198903 2 001	Anggota
5	Drs. BAMBANG SURONO NIP. 19581224 198203 1 011	Anggota
6	Drs. IRWAN FAHRONI NIP. 19590321 199203 1 002	Anggota
7	ALIFA HASNGGA WURI HANSI, S.Hut, MH NIP. 19770722 200604 2 014	Anggota
8	SULISMONO, S.Pd NIP. 19640208 200012 1 001	Anggota
9	SUGIOTO, SH NIP. 19590725 198101 1 003	Anggota
10	IRA TRI SUSANTI NIP. 19730621 200604 2 005	Anggota
11	NISWATY, SH, M.AP NIP. 19630820 199203 2 007	Anggota
12	M. NAWIR, B.Sc NIP. 19590810 198303 1 024	Anggota
13	RACHMAN HADI SAPUTRA NIP. 19780823 200604 1 009	Anggota
14	BAHRIAN, S.ST NIP. 19690629 199212 1 001	Anggota
15	ANDI HASRAH, B.Sw NIP. 19630207 199103 2 007	Anggota
16	TUKIYO, S.Sos NIP. 19671210 199212 1 001	Anggota
17	MOCHAMAD GUFRON,SH. NIP. 19820217 201503 1 002	Anggota

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
 KOTA BALIKPAPAN



DOKUMENTASI KEGIATAN :



